

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : PER-09/PJ/2019
TENTANG : TATA CARA PEMBATALAN DAN
PENCABUTAN SURAT KETERANGAN
PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2018

A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT PEMBATALAN SURAT KETERANGAN
Nomor : (3)

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4) tanggal (5) dengan ini Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
No. Surat Keterangan : (9)
Tanggal Surat Keterangan : (10)

dinyatakan dibatalkan terhitung sejak tanggal(11)

Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum Pajak Penghasilan sejak Tahun Pajak tidak terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.



.....,20..... (12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor
..... (13)

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pembatalan Surat Keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Pembatalan Surat Keterangan diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Pembatalan Surat Keterangan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

B. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

SURAT PENCABUTAN SURAT KETERANGAN
Nomor : (3)

Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4) tanggal (5) dengan ini Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas:

Nama : (6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
No. Surat Keterangan : (9)
Tanggal Surat Keterangan : (10)

dinyatakan dicabut terhitung sejak tanggal (11)

Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan umum Pajak Penghasilan sejak tidak terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.



.....,20..... (12)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (13)

Petunjuk Pengisian

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak pusat terdaftar.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Surat Pencabutan Surat Keterangan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan Alamat Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Surat Keterangan.
- Nomor (10) : Diisi dengan Tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (11) : Diisi dengan Tanggal Surat Pencabutan Surat Keterangan diterbitkan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya pencabutan Surat Keterangan.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

ttd

ODING RIFALDI
NIP 197003111995031002